

PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Ir. Suyatno, MKes

Office : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
Jl. Prof Sudarto, SH, Tembalang – Semarang Selatan

Contact : Hp. 08122815730, pin 2A031535

Blog : www.suyatno.blog.undip.ac.id.

E-mail : suyatno_undip@yahoo.com

PERJUANGAN DAN KOMITMEN- KOMITMEN INTERNASIONAL

- Selama abad ke 20 Konferensi Kependudukan Dunia dilaksanakan setiap 10 tahun.
 - 1954 di Roma Itali, target : menghasilkan pemahaman baru mengenai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan suatu perubahan besar yang segera terjadi di dunia
 - 1964 di Beograd, membahas isu fertilitas sebagai isu kebijakan untuk perencanaan pembangunan
 - Tahun 1974 di Bukares lebih maju pada pengembangan kebijakan
 - Tahun 1984 di Meksiko. Dalam konferensi ini wakil kelompok feminis mengemukakan bahwa program KB melanggar hak asasi perempuan, bersifat top-down, mementingkan target dan kuota.
- Konsep “*Women in Development*” dan “*Women and Development*” diperkenalkan namun keduanya belum dapat mengangkat hak-hak perempuan.

- 1994 Konferensi di Kairo ICPD (*International Conference on Population and Development*). Hasil : pemenuhan kebutuhan individu dan keluarga adalah penting dalam pembangunan.
- Wakil-wakil kelompok wanita mempromosikan pentingnya kesehatan wanita, hak-hak wanita, dan peluang-peluang bagi wanita.
- Pemberdayaan wanita (*women's empowerment*) dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan dan penduduk yang stabil

- Dokumen Kairo mendesak semua Negara segera mengupayakan tercapainya kesetaraan gender.
- Tahun 2004 semua negara termasuk Indonesia memperingati kesepakatan Kairo dengan membuat sejumlah kegiatan serta laporan selang 10 tahun konferensi, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai tiap negara.
- Laporan tersebut dikirimkan ke PBB sebagai bahan evaluasi dan menyambut Konferensi Dunia tentang perempuan yang diadakan tahun itu juga.

- **2 BUTIR PENTING DEKLARASI DAN PROGRAM AKSI HASIL KONFERENSI HAK ASASI MANUSIA DI WINA (1993)**

- Partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional dan internasional serta penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan tujuan utama masyarakat dunia
- Kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia serta harus dihapuskan

- **KONFERENSI WANITA SE-DUNIA DI BEIJING (1995) → Deklarasi dan Landasan Aksi terkenal dengan “Platform of Action” dengan 12 bidang kritis.**

Konferensi Beijing mengharuskan tiap pemerintahan di dunia melakukan ”*Gendermainstreaming*” atau pengarusutamaan gender dalam pembangunan

- **Perhatian masyarakat dunia, telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan pemerintah lokal/daerah karena itu isu gender perlu diidentifikasi untuk mengambil langkah-langkah penanggulangannya**

KONFERENSI PEREMPUAN SEDUNIA IV BEIJING 1995

B
I
D
A
N
G

K
R
I
T
I
S

- 1. PEREMPUAN DAN KEMISKINAN**
- 2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEREMPUAN**
- 3. PEREMPUAN DAN KESEHATAN**
- 4. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**
- 5. PEREMPUAN DAN KONFLIK BERSENJATA**
- 6. PEREMPUAN DAN EKONOMI**
- 7. PEREMPUAN DAN KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**
- 8. MEKANISME KELEMBAGAAN UNTUK KEMAJUAN PEREMPUAN**
- 9. HAK ASASI PEREMPUAN**
- 10. PEREMPUAN DAN MEDIA**
- 11. PEREMPUAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**
- 12. ANAK PEREMPUAN**

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

Pada bulan September 2000, Indonesia bersama-sama dengan 188 negara telah menandatangani Deklarasi Millennium, sebagai hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Millenium PBB.

Deklarasi tersebut mencakup kesepakatan tujuan pembangunan yang harus dicapai oleh masing-masing negara.

Selain tujuan juga disepakati target sasaran secara tegas untuk dicapai pada tahun 2015 diukur dari pencapaian tahun 1990.

Ada 7 tujuan yang disepakati secara global (**MDGs**) yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian
5. Meningkatkan kesehatan Ibu
6. Memerangi HIV /AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup

TAHAP PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- **WOMEN IN DEVELOPMENT (WID)**
- **WOMEN AND DEVELOPMENT (WAD)**
- **GENDER AND DEVELOPMENT (GAD)**

WID

- usaha praktis yang mencoba mengintegrasikan perempuan ke dalam pembangunan
- suatu pendekatan pertama yang memikirkan peran perempuan dalam pembangunan dan juga sebagai suatu kebijakan dalam pembangunan
- Pendekatan ini mulai dikenal pada tahun 1970 setelah Ester Boseroup mengeluarkan bukunya yang berjudul *Womes's Role and Economic Development*

- **WID (Perempuan dalam Pembangunan)** konsep didasarkan pada pengakuan atas pentingnya peran dan status perempuan dalam proses pembangunan.
- untuk memberikan perhatian khusus terhadap peran perempuan, melalui perluasan bantuan pembangunan.
- perempuan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara positif sebagai pelaku penting dalam proses pembangunan guna membuka jalan bagi peningkatan status perempuan.

- **mengharuskan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki baik dalam hal pendidikan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan sisi produktif perempuan**

WAD

- mempunyai **pengertian** yang lebih luas dalam memandang ulasan kritis terhadap perenan perempuan serta pengaruh kebijakan dan proyek pembangunan, yang tidak hanya menitikberatkan untuk mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan namun juga menganggap perempuan sebagai sosok yang penting dari segi ekonomi maupun pekerjaan publik atau domestiknya

- pendekatan ini merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan dan semua kerja yang dilakukan perempuan dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan dan mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

GAD

- **mempertegas hubungan sosial laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan**

Perbedaan WAD vs GAD

(Canadian Council for International Co-operation 1991, Two Halves Make a Whole, Ottawa)

	WAD	GAD
Pendekatan	Sumber permasalahan ada pada perempuan	Sumber permasalahan ada pada pembangunan
Masalah	Tidak berperan sertanya perempuan dalam proses pembangunan	Ketidak sejaran hubungan kekuasaan, menyebabkan berlangsungnya pembangunan yang tidak adil dan tidak berperan sertanya perempuan secara maksimal
Tujuan	Pembangunan yang lebih efektif dan efisien	Pembangunan yang adil dan berkesinambungan dengan laki – laki dan perempuan sebagai pengambil keputusan

	WAD	GAD
Pemecahan	Mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan	Memperkuat <i>empowerment</i> perempuan
Strategi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyek – proyek untuk perempuan ▪ Kegiatan proyek – proyek khusus perempuan ▪ Proyek – proyek terpadu : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produktivitas perempuan - Meningkatkan pendapatan perempuan - Meningkatkan ketrampilan perempuan dalam mengurus rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi kebutuhan praktis sebagaimana didefinisikan oleh laki –laki dan perempuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka ▪ Bersamaan dengan itu, ditangani juga kebutuhan strategis perempuan ▪ Menangani kebutuhan strategis golongan ekonomi lemah melalui pembangunan untuk rakyat.

Pengertian Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming)

Pengarusutamaan Gender adalah *strategi untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* dalam pembangunan, di mana aspek gender terintegrasi, dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

Tujuan PUG

Sesuai Inpres No. 9 tahun 2000 :

1. **Membentuk mekanisme untuk formulasi program dan kebijakan yang responsif gender.**
2. **Memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang mengalami dampak dari bias gender.**
3. **Memberikan pemahaman kepada semua pihak (Pemerintah maupun Non Pemerintah) agar mau melakukan tindakan yang responsif gender dibidangnya masing-masing.**

Sasaran PUG

- Sesuai dengan Inpres No. 9/2000, sasaran utama PUG adalah “lembaga Pemerintah” agar dengan segala kewenangan yang dimiliki dan SDM yang tersedia di tingkat Pusat sampai di lini lapangan, terutama yang berperan dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan, serta para perencana program yang terlibat dalam PUG.
- Organisasi Swasta
- Organisasi Profesi
- Organisasi Keagamaan, dll.

BUTA GENDER

**KONDISI / KEADAAN SESEORANG
YANG TIDAK MEMAHAMI
TENTANG PENGERTIAN ATAU
KONSEP GENDER
(Ada perbedaan kepentingan
Laki-laki dan perempuan)**

SENSITIF GENDER

KEMAMPUAN DAN KEPEKAAN SESEORANG
DALAM MELIHAT DAN MENILAI HASIL
PEMBANGUNAN DAN ASPEK KEHIDUPAN
LAINNYA DARI PERSPEKTIF GENDER
(disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda
antara laki-laki dan perempuan)

RESPONSIF GENDER

**KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN YANG
SUDAH MEMPERHITUNGGAN KEPENTINGAN
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

NETRAL GENDER

**KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN
ATAU KONDISI YANG TIDAK MEMIHAK
PADA SALAH SATU JENIS KELAMIN**

BIAS GENDER

**KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN
ATAU KONDISI YANG
MENGUNTUNGGKAN PADA SALAH
SATU JENIS KELAMIN**

ISU GENDER

- **PENDIDIKAN**

- Makin tinggi pendidikan makin sedikit perempuan
- Materi pendidikan yang bias gender
- Diskriminasi anak usia sekolah perempuan yang hamil

- **KESEHATAN**

- Tingginya un save abortion
- Tingginya kehamilan tak diinginkan terutama pada usia Remaja
- Tingginya angka kematian ibu terutama di daerah pesisir dan terpencil
- Tingginya angka penyakit HIV/AIDS

- **KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

- 6,6 % perkawinan pada usia muda (10-16 thn)
- 10 % Kepala Keluarga adalah perempuan/janda
- 85 % peserta KB adalah perempuan

- **EKONOMI**

- Kontribusi perempuan thd pendapatan daerah rendah
- Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 27 %

- **TENAGA KERJA**

- Perbedaan upah laki-laki dan perempuan (Rakernas 1999)
- Lebih 40 % tenaga kerja di sektor jasa pariwisata berusia di bawah umur (hasil survey LSM Suara Nurani 2000)

● **HUKUM**

- Banyak produk hukum yang bias gender
- Masih kurang peraturan yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan dan anak
- Masih kurang perempuan sebagai penegak hukum padahal banyak masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan
- Aturan hukum dan budaya hukum masih bias laki-laki

● **KELEMBAGAAN**

- Kelembagaan yang menangani pemberdayaan perempuan. (di propinsi tahun 2000 Biro, tahun 2001 Bagian, tahun 2003, tahun 2009 Badan.
- Kelembagaan di Kab/Kota masih bervariasi/belum jelas)
- Perencanaan dan penganggaran yang netral gender

STRATEGI PENDEKATAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

PENDEKATAN PRAKTIS;

Pendekatan melalui program khusus bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memberdayakan perempuan sehingga meningkatkan kemandiannya. (perbaikan taraf hidup, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih & pemberantasan buta aksara)

➤ **PENDEKATAN STRATEGIS;**

Bertujuan memadukan keinginan dan kepentingan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pembangunan dengan memperlakukan kepentingan laki-laki dan perempuan secara setara dalam peran, hak dan tanggungjawab sebagai subyek dan kemitrasejajaran yang harmonis.
(Penghapusan kekerasan, persamaan upah utk jenis pekerjaan yang sama)

DASAR HUKUM

- UUD 1945 PSL 4 & PASAL 27 TENTANG PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA TIDAK ADA KECUALINYA.
- UU NO. 25/2000 TTG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
- INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 9/2000 TTG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

MENGAPA PUG DIPERLUKAN ?

- Pemerintah dapat bekerja lebih efisien & efektif dlm memproduksi kebijakan-kebijakan publik yg adil dan responsif gender kepd rakyatnya perempuan dan laki-laki
- Kebijakan dan pelayanan publik serta program & perundang-undangan yang adil & responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki
- PUG mrpkan upaya utk menegakkan hak-hak perempuan & laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama & penghargaan yang sama dimasyarakat
- PUG mengantar kepada pencapaian KKG dan karenanya PUG meningkatkan Akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.
- Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik, Ekonomi suatu bangsa.

APA KEUNTUNGAN MENYELENGGARAKAN PUG ?

Dapat diidentifikasi apakah laki-laki & Perempuan

- Memperoleh **akses** yang sama kepada Sumber Daya Pembangunan
- Ber**partisipasi** yang sama dlm proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan
- Memiliki **kontrol** yang sama atas sumber daya pembangunan; dan
- Memperoleh **manfaat** yang sama dari hasil pembangunan

Sasaran yang dilaksanakan :

1. Sosialisasi PUG dlm rangka mewujudkan Kesetaraan dan keadilan gender
2. Memberdayakan perempuan dalam mengejar ketertinggalannya untuk menuju setara dengan kaum laki-laki.

INPRES NO 9 THN 2000 TENTANG PUG DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESIDEN RI MENGINSTRUKSIKAN KEPADA

- 1. MENTERI**
- 2. KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**
- 3. PIMPINAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA
TERTINGGI/TINGGI NEGARA**
- 4. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA**
- 5. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**
- 6. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
- 7. GUBERNUR**
- 8. BUPATI / WALIKOTA**

UNTUK PERTAMA

**MELAKSANAKAN PUG GUNA
TERSELENGGARANYA PERENCANAAN,
PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI ATAS KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN NASIONAL YG BERPERSPEKTIF
GENDER SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN
FUNGSI SERTA KEWENANGAN MASING-MASING**

KEDUA

Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pug dlm Pemb. Nas sebgm terlampir dlm Inpres ini sbg acuan dlm melaksanakan PUG

KETIGA

Khusus utk Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan :

- 1. Memberikan Bantuan Teknis kepd instansi dan lembaga pemerintah dlm pelaksanaan pug**
- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pug kepada Presiden**

KEEMPAT

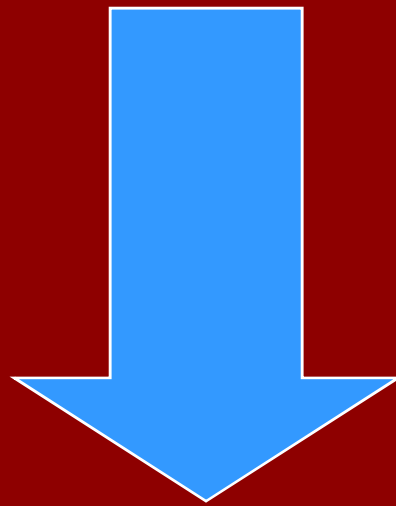
Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yg diperlukan bagi pelaksanaan Inpres ini.

KELIMA

Inpres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

APAKAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PROYEK/KEGIATAN PEMBANGUNAN SAAT INI SUDAH RESPONSIF GENDER ?

PERENCANAAN ?
PELAKSANAAN ?
PEMANTAUAN ?
EVALUASI ?

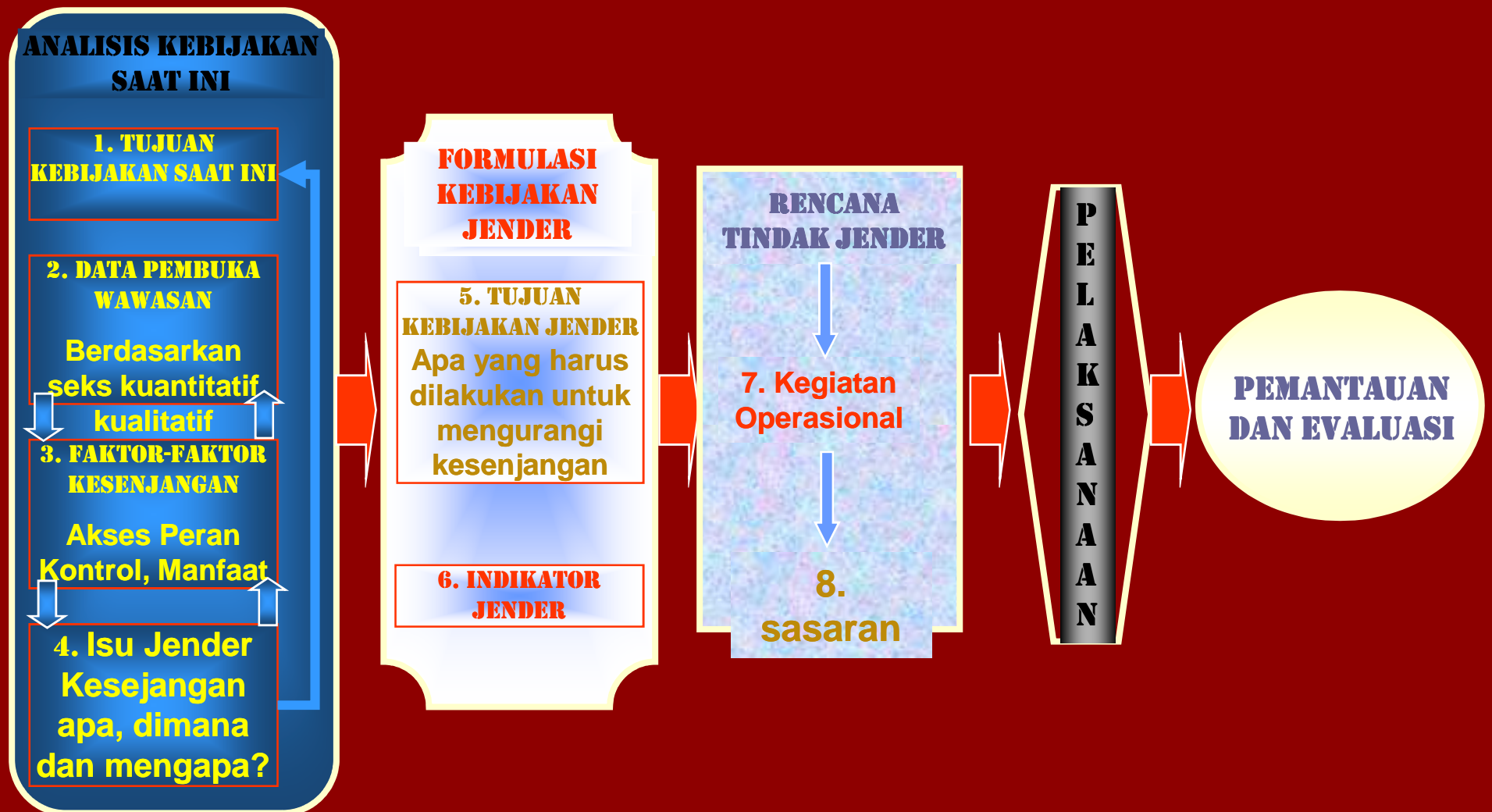


AKSES ?
PARTISIPASI ?
KONTROL ?
MANFAAT ?

KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN YANG RESPONSIF GENDER

ALUR KERJA ANALISIS JENDER

(GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP))



Terima Kasih